



Evaluasi Penganggaran dalam Program Penurunan Stunting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Surabaya

Nur Wahdatunnisa^{1*}, Eva Hany Fanida², Melda Fadiyah Hidayat³

¹⁻³Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: 25040674376@mhs.unesa.ac.id^{1}, evafanida@unesa.ac.id², meldahidayat@unesa.ac.id³

*Korespondensi penulis: 25040674376@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the budgeting activities of the Surabaya City Women's Empowerment, Child Protection, and Population Control and Family Planning Agency (DP3A-PPKB) in supporting stunting reduction, while evaluating policy effectiveness, efficiency, responsiveness, and accuracy through William N. Dunn's evaluation framework. A qualitative case study design was utilized, supported by document analysis of planning records, budget realizations, and stunting prevalence data from 2019–2024. Findings reveal that DP3A's budget allocation aligns with the regional development plan and facilitates family-based sensitive interventions. Despite the first-quarter 2025 realization reaching only 9.5% of the total IDR 58.3 billion, strategic programs persisted through cross-sectoral collaboration and adaptive implementation strategies involving multiple stakeholders. The study concludes that DP3A's contributions are indirect, contingent on inter-organizational synergy among regional apparatus units (OPD). Ultimately, stunting reduction success hinges not on budget magnitude alone, but on systemic integration, policy coordination, and sustained collaborative governance across sectors. These findings emphasize the importance of strengthening institutional networks to improve program effectiveness and long-term nutritional outcomes for children.*

Keywords: Budget Analysis; Collaborative Governance; Policy Evaluation; Stunting; Surabaya.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis aktivitas penganggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya dalam mendukung penurunan stunting serta menilai efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan kebijakan menggunakan kerangka evaluasi William N. Dunn. Metode kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, didukung analisis dokumen perencanaan, realisasi anggaran, dan data prevalensi stunting periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran DP3A selaras dengan rencana pembangunan daerah dan mendukung intervensi sensitif berbasis keluarga. Meskipun realisasi anggaran Triwulan I 2025 baru mencapai 9,5 persen dari total Rp58,3 miliar, program strategis tetap berjalan melalui skema kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontribusi DP3A bersifat tidak langsung dan bergantung pada sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Keberhasilan penurunan stunting tidak hanya ditentukan besaran anggaran, melainkan oleh integrasi sistem dan koordinasi kebijakan dalam tata kelola kolaboratif.

Kata kunci: Analisis anggaran; Evaluasi kebijakan; Stunting; Surabaya; Tata kelola kolaboratif.

1. LATAR BELAKANG

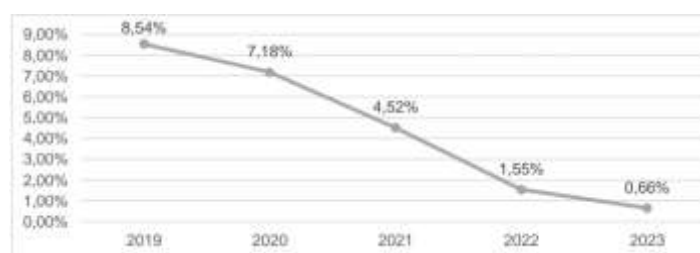
Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada terhambatnya pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif, kemampuan belajar, serta produktivitas individu di masa dewasa. Dalam jangka panjang, stunting dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada produktivitas ekonomi suatu negara (Hakim & Rahman, 2023). Oleh karena

itu, penanganan stunting tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga menjadi isu pembangunan yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Hal ini tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menekankan pendekatan holistik, integratif, dan konvergen melalui kerja sama lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 (Bappenas, 2020). Target tersebut menuntut keterlibatan berbagai sektor pembangunan, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga sektor pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perlindungan anak, serta pembangunan keluarga. Strategi nasional percepatan penurunan stunting juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola, termasuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta pengembangan kapasitas pelaksana di tingkat daerah (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Secara nasional, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia menurun dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen. Provinsi Jawa Timur pada tahun yang sama mencatatkan prevalensi sebesar 19,2 persen, yang berarti masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting masih memerlukan upaya yang lebih optimal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung program penurunan stunting. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang menunjukkan capaian signifikan dalam upaya tersebut. Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya menunjukkan bahwa prevalensi stunting mengalami penurunan yang cukup drastis dari 8,54 persen pada tahun 2019 menjadi 7,18 persen pada tahun 2020, kemudian turun menjadi 4,52 persen pada tahun 2021, 1,55 persen pada tahun 2022, dan mencapai 0,66 persen pada tahun 2023. Penurunan yang signifikan ini menjadikan Kota Surabaya sebagai salah satu daerah dengan angka stunting terendah di Indonesia serta sering dijadikan sebagai contoh praktik baik (*best practice*) dalam percepatan penurunan stunting di tingkat nasional.



Gambar 1. Prevalansi Balita Stunting tahun 2019-2023.

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk program percepatan penurunan stunting. Efektivitas penganggaran tidak hanya diukur dari besarnya alokasi dana yang disediakan, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan program, realisasi anggaran, serta capaian hasil yang diharapkan (Wibowo & Suryani, 2022). Wali Kota Surabaya menegaskan komitmen untuk memastikan penggunaan anggaran stunting secara tepat sasaran dengan meminimalkan pemborosan serta mendorong penganggaran berbasis data individual melalui pendekatan "per rekening" yang sejalan dengan konsep *performance-based budgeting* (Pratama, 2025).

Dalam pelaksanaan program penurunan stunting di Kota Surabaya, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Salah satu OPD yang memiliki peran strategis adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB). Berbeda dengan Dinas Kesehatan yang lebih fokus pada intervensi spesifik seperti pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi, DP3A-PPKB berperan dalam intervensi sensitif yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga, pola asuh anak, pemberdayaan perempuan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terkait kesehatan dan gizi keluarga. Dalam kerangka kebijakan nasional, intervensi sensitif menyorot penyebab tidak langsung stunting, meliputi pola asuh, pemberdayaan perempuan, pendidikan pengasuhan 1.000 HPK, pendampingan calon pengantin, serta optimalisasi peran kader dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025, DP3A-PPKB Kota Surabaya mengelola total anggaran sebesar Rp57.441.304.420 yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasi (99,6 persen), terdiri dari belanja pegawai Rp13.585.326.001 dan belanja barang dan jasa Rp44.346.201.409. Struktur anggaran tersebut menunjukkan bahwa program-program yang

dijalankan oleh DP3A-PPKB lebih banyak berorientasi pada kegiatan operasional, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan publik yang mendukung pencegahan stunting secara tidak langsung. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program strategis seperti edukasi pengasuhan anak pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pembinaan calon pengantin, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Program-program tersebut merupakan bagian dari intervensi sensitif yang berfokus pada pencegahan stunting melalui pendekatan keluarga dan masyarakat (Putri & Yulianti, 2024).

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, efektivitas suatu program tidak hanya ditentukan oleh tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga oleh kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan kebutuhan masyarakat serta capaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dinamika realisasi anggaran, termasuk potensi keterlambatan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat yang menyebabkan realisasi Triwulan I 2025 baru mencapai 9,5 persen dari total alokasi, menunjukkan fenomena menarik bahwa efektivitas program tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran yang diserap (Rahayu & Widodo, 2023). Program strategis tetap dapat berjalan melalui skema kolaborasi lintas sektor meskipun serapan anggaran rendah, yang mengindikasikan perlunya evaluasi dengan kerangka yang lebih komprehensif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penanganan stunting di Kota Surabaya dari berbagai perspektif. Beberapa studi berfokus pada evaluasi inovasi kebijakan melalui program intervensi spesifik seperti Posyandu, dengan menyoroti keberhasilan program dalam menurunkan angka stunting serta efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran. Penelitian lain mengkaji strategi kolaboratif Pemerintah Kota Surabaya dalam percepatan penurunan stunting dan menemukan bahwa proses kolaborasi yang melibatkan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, dan berbagi pemahaman telah berjalan cukup efektif. Studi lainnya mengevaluasi efektivitas aplikasi "Sayang Warga" dalam mendukung pendataan stunting dan menyimpulkan bahwa aplikasi tersebut cukup efektif meskipun masih terdapat kendala teknis. Selain itu, terdapat pula kajian tentang smart city dalam pembangunan kota Surabaya secara umum yang menyoroti berbagai inovasi digital yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk menganalisis efektivitas aktivitas penganggaran tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam konteks penganggaran program penurunan stunting, penelitian ini memfokuskan pada empat kriteria utama. Efektivitas digunakan untuk menilai

sejauh mana penganggaran mencapai tujuan penurunan stunting yang telah ditetapkan. Efisiensi mengukur hubungan antara *input* anggaran dan *output* program yang dihasilkan. Responsivitas menilai sejauh mana kebijakan anggaran merespons kebutuhan kelompok sasaran seperti calon pengantin, ibu hamil, dan baduta. Ketepatan mengukur apakah hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat bagi penurunan stunting dalam jangka panjang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara kebijakan anggaran, pelaksanaan program, serta hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas aktivitas penganggaran dalam program penurunan stunting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis keselarasan antara perencanaan dan alokasi anggaran program penurunan stunting pada DP3A-PPKB Kota Surabaya; (2) mengevaluasi efektivitas aktivitas penganggaran dalam mendukung pelaksanaan program penurunan stunting berdasarkan kerangka William N. Dunn; serta (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penganggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan keuangan daerah, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah terkait program pembangunan sosial. Penelitian ini juga memperkaya penerapan kerangka evaluasi Dunn dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Surabaya, khususnya DP3A-PPKB, dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran program penurunan stunting serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam merancang strategi penganggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam tentang efektivitas penganggaran dalam program penurunan stunting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya. Desain studi kasus digunakan karena penelitian

berfokus pada kasus spesifik, yaitu aktivitas penganggaran DP3A-PPKB dalam periode 2019-2024.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang terkait dengan program penurunan stunting di Kota Surabaya. Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan memilih dokumen-dokumen yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu: (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025; (2) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DP3A-PPKB Tahun Anggaran 2025; (3) data prevalensi stunting periode 2019-2023; serta (4) penelitian-penelitian terdahulu tentang penanganan stunting di Surabaya.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengkaji dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian berupa panduan dokumentasi yang disusun berdasarkan kerangka evaluasi William N. Dunn, meliputi empat kriteria utama: efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan. Panduan ini digunakan untuk mengekstrak data-data penting dari dokumen, seperti alokasi anggaran, realisasi program, sasaran kegiatan, dan capaian penurunan stunting.

Data dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi tiga tahapan. Pertama, kondensasi data yaitu memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan kriteria evaluasi. Kedua, penyajian data yaitu menyusun data dalam bentuk tabel, matriks, atau narasi untuk memudahkan interpretasi. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu merumuskan temuan penelitian dan melakukan pengecekan ulang melalui triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data anggaran dari berbagai dokumen, membandingkan data prevalensi stunting dari berbagai sumber, serta membandingkan temuan penelitian dengan hasil-hasil penelitian terdahulu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kota Surabaya menunjukkan capaian signifikan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, prevalensi stunting mengalami penurunan konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 prevalensi stunting tercatat sebesar 8,54 persen, menurun menjadi 7,18 persen pada tahun 2020, 4,52 persen pada tahun 2021, 1,55 persen pada tahun 2022, dan mencapai 0,66 persen pada tahun 2023 (Dinas Kesehatan Kota

Surabaya, 2024). Capaian ini menjadikan Surabaya sebagai salah satu kota dengan angka stunting terendah di Indonesia.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya melalui kebijakan penganggaran. Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat sesuai tugas dan fungsinya, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) yang berperan dalam intervensi sensitif berbasis keluarga. Intervensi sensitif menasar penyebab tidak langsung stunting, meliputi penguatan ketahanan keluarga, pola asuh anak, pemberdayaan perempuan, pendampingan calon pengantin, serta edukasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Keselarasan Perencanaan dan Alokasi Anggaran DP3A-PPKB

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025, DP3A-PPKB Kota Surabaya mengelola total anggaran sebesar Rp57.441.304.420. Struktur anggaran disajikan pada Tabel 1.

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025				RKA-SKPD	
Urusan Pemerintahan : (1) 121 Rencana Strategis dan Kebijakan Sektoral Organisasi : (1) 12 0100 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERBURANG) (Rp)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	Belanja Daerah				
5.1	Belanja Operasi				
5.1.01	Belanja Pegawai	11.585.700.000	14.620.400.100	3.034.700.100	26,3
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.845.672.300	44.346.701.400	(1.498.970.900)	-3,3
	Jumlah Belanja Operasi	57.431.372.300	58.967.101.500	1.535.729.200	2,7
5.2	Belanja Modal				
5.2.02	Belanja Modal: Perbaikan dan Hutan	210.907.120	211.330.200	423.080	0,2
	Jumlah Belanja Modal	210.907.120	211.330.200	423.080	0,2
	Jumlah Belanja Daerah	57.441.304.420	58.983.349.840	1.542.052.420	2,7
	Surplus / (Defisit)	(57.441.304.420)	(58.983.349.840)	1.542.052.420	2,7

Surabaya,
Kepala Desa

Drs. H. Hidayat, S.P.
Pangkat: Penghulu
NIP. 19600309119802102

Gambar 2. Tabel Struktur Anggaran DP3A-PPKB Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.

Sumber: RKA-SKPD DP3A-PPKB Kota Surabaya TA 2025

Struktur anggaran yang didominasi belanja operasi (99,6 persen) menunjukkan bahwa fokus utama DP3A-PPKB adalah pada penyelenggaraan program dan layanan publik yang bersifat operasional. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung berbagai program intervensi sensitif, antara lain edukasi pengasuhan anak pada masa 1.000 HPK, pembinaan calon pengantin, pendampingan keluarga berisiko stunting, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta layanan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan (DP3A-PPKB Kota Surabaya, 2025).

Dari sisi keselarasan dengan perencanaan pembangunan daerah, program-program tersebut telah sesuai dengan prioritas yang tertuang dalam RKPD Kota Surabaya, khususnya dalam mendukung pencapaian target penurunan stunting dan penguatan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keselarasan antara perencanaan dan penganggaran telah terpenuhi.

Efektivitas Penganggaran Berdasarkan Kerangka William N. Dunn

Efektivitas

Kriteria efektivitas dalam kerangka Dunn digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai hasil yang diharapkan (Dunn, 2017). Dalam konteks penganggaran program penurunan stunting pada DP3A-PPKB, efektivitas diukur dari kontribusi anggaran terhadap penurunan prevalensi stunting di Kota Surabaya.

Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Surabaya menurun dari 8,54 persen pada tahun 2019 menjadi 0,66 persen pada tahun 2023 (Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2024). Penurunan ini terjadi seiring dengan pelaksanaan berbagai program intervensi sensitif yang didanai melalui anggaran DP3A-PPKB. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum program-program yang dilaksanakan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

Namun demikian, efektivitas penganggaran tidak dapat dinilai hanya dari capaian akhir semata. Program-program intervensi sensitif bersifat tidak langsung dan membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan hasil. Hal ini sejalan dengan karakteristik intervensi sensitif yang menasar pada perubahan perilaku dan penguatan kapasitas keluarga, yang dampaknya baru terlihat dalam jangka menengah hingga panjang (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Efisiensi

Kriteria efisiensi mengukur hubungan antara *input* anggaran yang dikeluarkan dengan *output* program yang dihasilkan (Dunn, 2017). Beberapa temuan terkait efisiensi penganggaran DP3A-PPKB adalah sebagai berikut.

Pertama, realisasi anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2025 baru mencapai 9,5 persen dari total alokasi. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh belum cairnya Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat, sehingga beberapa program strategis harus digeser pelaksanaannya ke Triwulan II dan III (DP3A-PPKB Kota Surabaya, 2025). Rendahnya serapan anggaran bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan karena jadwal pelaksanaan 40 sub-kegiatan yang memang direncanakan menyebar hingga akhir tahun.

Kedua, meskipun realisasi anggaran rendah, program-program strategis tetap dapat berjalan melalui skema kolaborasi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan program. Temuan ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kerja sama antar OPD dalam pencapaian tujuan pembangunan (Ansell & Gash, 2008).

Ketiga, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1,9 miliar yang dilakukan tanpa menyentuh program strategis. Efisiensi tersebut menyasar belanja operasional seperti sarana prasarana, konsumsi, dan belanja modal internal, sementara program-program prioritas tetap berjalan dan tidak terdampak. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga efisiensi tanpa mengorbankan capaian tujuan kebijakan.

Responsivitas

Kriteria responsivitas menilai sejauh mana kebijakan anggaran merespons kebutuhan kelompok sasaran (Dunn, 2017). Dalam konteks program penurunan stunting, kelompok sasaran utama meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-59 bulan.

Berdasarkan dokumen RKA-SKPD, program-program DP3A-PPKB telah dirancang untuk menjangkau kelompok sasaran tersebut secara spesifik. Program pembinaan calon pengantin, misalnya, menyasar pasangan yang akan menikah dengan pendataan terintegrasi antara Kantor Kementerian Agama dan Puskesmas untuk mendeteksi risiko kekurangan gizi sejak dini (DP3A-PPKB Kota Surabaya, 2025).

Selain itu, layanan rumah aman (*shelter*) bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga menjadi bentuk responsivitas terhadap kebutuhan perlindungan kelompok rentan. Layanan ini dijalankan sepanjang tahun tanpa terikat jadwal triwulanan, karena merupakan bentuk pemenuhan hak anak yang harus terus berjalan.

Ketepatan

Kriteria ketepatan menilai apakah hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat bagi kelompok sasaran dan memiliki dampak jangka panjang (Dunn, 2017). Program-program intervensi sensitif yang dilaksanakan DP3A-PPKB, seperti edukasi pengasuhan 1.000 HPK, pendampingan calon pengantin, dan pemberdayaan ekonomi perempuan, memiliki orientasi jangka panjang. Manfaat program baru akan terlihat secara signifikan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan, ketika anak-anak yang saat ini berada dalam masa 1.000 HPK tumbuh menjadi generasi yang sehat dan cerdas.

Ketepatan program juga tercermin dari pendekatan berbasis data yang digunakan Pemerintah Kota Surabaya. Aplikasi "Sayang Warga" memungkinkan pemutakhiran data secara berkala sehingga intervensi dapat lebih tepat sasaran pada individu dan keluarga yang membutuhkan (Prayoga, 2024). Integrasi data antar-OPD juga memungkinkan perencanaan dan penganggaran yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *evidence-based budgeting* yang menekankan pentingnya data dalam proses penganggaran publik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penganggaran

Faktor Pendukung

Komitmen politik pimpinan daerah menjadi faktor pendukung utama efektivitas penganggaran. Arahan Wali Kota Surabaya untuk menggunakan pendekatan "per rekening" dan penganggaran berbasis data menunjukkan adanya *political will* yang tinggi untuk memastikan anggaran tepat sasaran (Pemerintah Kota Surabaya, 2024).

Kolaborasi lintas sektor yang kuat juga berkontribusi signifikan. Meskipun realisasi anggaran DP3A-PPKB rendah di Triwulan I, program-program strategis tetap dapat berjalan melalui skema kolaborasi dengan OPD lain. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh sinergi antar pemangku kepentingan (Erlanda & Rahmadanik, 2023).

Dukungan teknologi informasi melalui aplikasi "Sayang Warga" menjadi instrumen penting dalam mendukung penganggaran berbasis data. Aplikasi ini memungkinkan pemutakhiran data secara berkala, pemantauan tumbuh kembang anak secara *real-time*, dan integrasi data antar-OPD (Prayoga, 2024).

Partisipasi masyarakat melalui Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam pendataan dan pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi faktor pendukung yang signifikan. Hal ini sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Surabaya dalam menangani berbagai permasalahan sosial (Arieffiani & Ekowanti, 2024).

Faktor Penghambat

Ketergantungan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat menjadi kendala utama. Realisasi anggaran Triwulan I 2025 yang hanya mencapai 9,5 persen terutama disebabkan oleh belum cairnya DAK pusat (DP3A-PPKB Kota Surabaya, 2025). Ketergantungan pada transfer dana dari pusat ini menghambat kelancaran pelaksanaan program, terutama di awal tahun anggaran.

Jadwal pelaksanaan program yang tersebar sepanjang tahun menyebabkan penyerapan anggaran tidak merata setiap triwulan. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif tentang kinerja penyerapan anggaran, meskipun secara perencanaan hal tersebut sudah sesuai jadwal.

PEMBAHASAN

Hasil evaluasi terhadap aktivitas penganggaran DP3A-PPKB Kota Surabaya menunjukkan dinamika yang menarik dalam perspektif keuangan daerah. Di satu sisi, alokasi anggaran yang besar (Rp57,44 miliar) dan dominasi belanja operasi (99,6 persen) menunjukkan komitmen fiskal yang kuat untuk mendukung program intervensi sensitif penurunan stunting. Di sisi lain, realisasi anggaran Triwulan I 2025 yang baru mencapai 9,5 persen memunculkan pertanyaan tentang efisiensi dan efektivitas penyerapan anggaran.

Namun, jika dianalisis lebih mendalam, rendahnya realisasi anggaran tidak serta-merta mencerminkan rendahnya kinerja program. Penjadwalan 40 sub-kegiatan yang tersebar hingga akhir tahun serta keterlambatan pencairan DAK pusat menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi penyerapan anggaran di awal tahun. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas program tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran yang diserap, tetapi juga oleh faktor koordinasi, komitmen pelaksana, dan ketepatan desain intervensi (Arieffiani & Ekowanti, 2024).

Dari perspektif teori evaluasi kebijakan Dunn (2017), keempat kriteria evaluasi saling terkait dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks penganggaran program penurunan stunting di Surabaya, keempat kriteria tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa catatan perbaikan.

Kriteria efektivitas terpenuhi dengan tren penurunan prevalensi stunting yang konsisten. Kriteria efisiensi menunjukkan adanya upaya optimalisasi sumber daya melalui efisiensi belanja operasional tanpa mengurangi program strategis, serta kemampuan menjalankan program melalui kolaborasi lintas sektor meskipun realisasi anggaran rendah.

Kriteria responsivitas terpenuhi dengan adanya program-program yang menyoar kelompok rentan secara spesifik. Kriteria ketepatan tercermin dari pendekatan berbasis data dan orientasi jangka panjang program intervensi sensitif.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang melibatkan dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen, dan berbagi pemahaman telah berjalan cukup efektif di Surabaya (Erlanda & Rahmadanik, 2023). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi "Sayang Warga" juga

terbukti efektif dalam mendukung pendataan dan pemantauan tumbuh kembang anak (Prayoga, 2024).

Fenomena menarik lainnya adalah adanya efisiensi anggaran sebesar Rp1,9 miliar yang dilakukan tanpa menyentuh program strategis. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berupaya menjaga efektivitas program di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *performance-based budgeting* yang menekankan pada pencapaian hasil daripada sekadar penyerapan anggaran.

Dengan demikian, evaluasi terhadap aktivitas penganggaran DP3A-PPKB Kota Surabaya menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak ditentukan oleh besaran anggaran semata, melainkan oleh integrasi sistem, koordinasi kebijakan, ketepatan desain intervensi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam kerangka tata kelola kolaboratif (Susanti dkk., 2024).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sesudah memeriksa hasil evaluasi terhadap anggaran yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya dalam program penurunan stunting, ada beberapa hal yang bisa ditarik sebagai kesimpulan.

Pertama, mengenai anggaran. DP3A-PPKB mengelola anggaran sebesar Rp57,44 miliar pada tahun 2025. Namun, sebagian besar tepatnya 99,6 persen dari anggaran ini digunakan untuk belanja operasional. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat langsung menyentuh masyarakat, seperti edukasi pengasuhan anak dalam program Hari Pertama Kehidupan di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pembinaan calon pengantin, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.

Kedua, kalau dilihat dari kaca mata evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn, efektivitas penganggaran DP3A-PPKB tergolong cukup baik. Penurunan angka stunting di Surabaya cukup konsisten, sekalipun angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Dari tahun 2019 hingga tahun 2023, angka stunting di Surabaya menurun dari 8,54 persen. Efisiensi juga tampak dalam kemampuan dinas ini dalam menjalankan program meskipun realisasi anggaran di triwulan pertama tahun 2025 hanya mencapai 9,5 persen karena

belum cairnya Dana Alokasi Khusus dari pusat. Kedua, dari aspek responsivitas, tampaknya program yang dijalankan ini efektif karena mengarah pada kelompok-kelompok yang rentan, seperti calon pengantin, ibu hamil, dan balita. Lalu, ketepatan program ditunjukkan dalam perhatian pada program jangka panjang dan penggunaan aplikasi Sayang Warga yang membantu dalam pendataan berdasarkan kebutuhan yang nyata.

Ketiga, ada beberapa hal yang ikut berperan dalam keberhasilan penganggaran ini. Di satu sisi, ada hal yang mendukung keberhasilan ini, yaitu adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah, solidnya kerja sama lintas sektor, bantuan teknologi informasi, dan peran masyarakat yang berperan melalui kader-kader Surabaya Hebat. Di sisi lain, ada hal yang menghambat keberhasilan seperti ketergantungan pada Dana Alokasi Khusus yang pencairannya sering molor, beserta jadwal pelaksanaan program yang terbagi sepanjang tahun sehingga penyerapan anggaran terlihat tidak merata per triwulannya.

Saran

Berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan ke depan.

Pertama, Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pencairan Dana Alokasi Khusus. Pasalnya, keterlambatan dana ini cukup mengganggu pelaksanaan program di awal tahun, padahal jadwal kegiatan sudah disusun sejak awal.

Kedua, DP3A-PPKB perlu terus mengencangkan sosialisasi ke masyarakat, terutama terkait pola asuh dan pemberian Makanan Pendamping ASI yang tepat. Karena tidak sedikit orang tua yang masih belum memahami betapa pentingnya gizi seimbang dalam menunjang pertumbuhan anak, terutama dalam masa-masa awal hidupnya.

Ketiga, aplikasi Sayang Warga yang digunakan dalam proses pendataan juga harus dikembangkan, bukan hanya dalam hal kemampuan aplikasi tersebut, tetapi juga dalam hal kemudahan penggunaannya. Kader Surabaya Hebat yang menjadi ujung tombak dalam lapangan juga harus didampingi secara teknis, bukan hanya dalam hal kemampuan menggunakan aplikasi tersebut.

Keempat, dalam hal penelitian selanjutnya, akan menarik jika penelitian yang mengukur efek jangka panjang program intervensi sensitif ini, misalnya 5-10 tahun lagi. Pendekatan kuantitatif juga bisa dicoba untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara anggaran yang lebih terukur.

DAFTAR REFERENSI

- Arieffiani, D., & Ekowanti, M. R. L. (2024). Evaluating local government policy innovations: A case study of Surabaya's efforts in combating stunting and enhancing public health services quality. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 1–20.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2024). *Data prevalensi stunting Kota Surabaya tahun 2019-2023*. Pemerintah Kota Surabaya.
- DP3A-PPKB Kota Surabaya. (2025). *Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025*. Pemerintah Kota Surabaya.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). Routledge.
- Erlanda, V., & Rahmadanik, D. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya percepatan penurunan stunting. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 26(2), 90–96.
- Hakim, L., & Rahman, A. (2023). Dampak Jangka Panjang Stunting Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 45–58.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Buku saku hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting*. Kementerian Kesehatan RI.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025*.
- Pratama, A. B. (2025). Evidence-Based Budgeting in Local Government: A Case Study of Health Sector Interventions. *Public Administration Review Indonesia*, 4(1), 22–35.
- Putri, R. A., & Yulianti, D. (2024). Evaluasi Intervensi Sensitif Berbasis Keluarga dalam Pencegahan Stunting di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 11(3), 201–215.
- Rahayu, S., & Widodo, T. (2023). Analisis Kinerja Anggaran Program Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Sensitif dan Spesifik. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 9(2), 88–102.

Susanti, E., Hidayat, M., & Kusuma, A. (2024). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Era Desentralisasi: Sinergi Lintas Sektor. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(1), 55–70.

Wibowo, H., & Suryani, I. (2022). Implementasi Performance-Based Budgeting pada Sektor Kesehatan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 112–125.